PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana

RENDI SEPTIARDI
NIM. B1013211003

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2025

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan nasional di Indonesia yang terus menjadi tantangan, meskipun berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah dengan melibatkan para ahli, tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Kondisi ini muncul akibat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak, yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pendapatan. Kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga tingkat kedalaman dan keparahannya. Oleh karena itu, selain menekan angka kemiskinan, pemerintah perlu mengurangi dampaknya secara lebih mendalam. Faktor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan memiliki pengertian yang sangat beragam karena masalah ini bersifat multidimensional, yang berarti berkaitan dengan berbagai aspek kebutuhan manusia (Hasan, 2022). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dalam berbagai dimensi. Ini mencakup pendapatan yang rendah serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup dengan bermartabat. Selain itu, kemiskinan juga mencakup kurangnya kualitas kesehatan dan pendidikan, terbatasnya jalur terhadap air bersih dan sanitasi, serta kondisi fisik yang tidak memadai untuk menjamin keamanan, kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta terbatasnya kapasitas dan kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menurut (Zulkifli, 2019) Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pengukuran kemiskinan dilakukan melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yang menekankan pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak. Biaya per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin di Indonesia. Menurut (Kumalasari, 2011), sementara itu, aspek sosial ekonomi mencakup ukuran yang lebih luas daripada kedua aspek lainnya. Ini mencakup faktor-faktor seperti kesehatan, gizi, melek huruf, harapan hidup, angka kematian bayi, dan keamanan, serta berbagai indikator lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia.

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang dalam mensejahterakan diri nya, dalam banyak dimensi, termasuk pendapatan yang rendah dan ketidak mampuan untuk memperoleh kebutuhan pokok makanan, dan kebutuhan pokok selain makanan yang diperlukan untuk bertahan hidup yang layak. Tingkat kemiskinan, menurut (Mulia & Putri, 2022), diukur berdasarkan kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, persentase penduduk di suatu daerah yang pendapatannya berada di bawah batas minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. (Susilowati, 2010), menentukan tingkat kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan, yang merupakan jumlah biaya minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan dasar harian. Garis ini dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu kebutuhan pangan dan non-pangan.